

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan waktu selalu disertai dengan peningkatan jumlah penduduk perkotaan serta meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan teknologi mengakibatkan meningkatnya kegiatan penduduk di wilayah perkotaan. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatannya telah mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan akan ruang kekotaan yang besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota yang bersifat tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang sebagai tempat tinggal dan fungsi – fungsi kekotaan akan merambah ke wilayah pinggiran kota. Gejala pengambilalihan lahan non perkotaan oleh penggunaan lahan *urban* di daerah pinggiran kota disebut sebagai “*invasion*”. Proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar disebut “*urban sprawl*”.

Terdapat sebuah definisi *urban sprawl* antara lain perluasan wilayah keluar pusat kota termasuk konversi lahan di wilayah pinggiran dari pusat kota dengan penggunaan lahan non perkotaan menjadi penggunaan perkotaan, perluasan secara terus menerus di sekitar kota besar dimana terjadi proses konversi penggunaan lahan dari pedesaan menjadi perkotaan dan pertumbuhan wilayah metropolitan yang berpengaruh pada proses perubahan penggunaan lahan di wilayah pinggiran.

Para ahli geografi menelaah ruang pengaruh dan menunjukkan bahwa semakin dekat ke pusat kota, genggaman oleh kota makin terasa, baik dalam hal materil maupun gagasan dan nilai-nilai budaya serta rohani lainnya. Kota selalu mempunyai ikatan erat dengan wilayah yang mengelilinginya. Di Eropa interaksi kota wilayah memunculkan sebutan untuk kawasan luar kota yang agraris, misalnya “*Umland*” (sebutan geografis di Jerman dan Skandinavia); di Inggris orang biasa menamakannya “*hinterland*” (daerah pedalaman atau belakang). Adapun berdasarkan fungsi pengaruh kota terhadap pedalaman tadi lalu muncul sebutan “*catchment area*”, *space of influence* dan *urban field* serta masih ada lagi yaitu *city region* (Daldjoeni, 1987).

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Gejala *urban sprawl* telah terjadi di Kecamatan Cilengkrang yang diidentifikasi melalui luas, arah, dan pola perkembangannya. Luas *urban sprawl* dihitung sampai batas perkembangan akhir pemukiman yang berada pada wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Arah ditentukan dari perkembangan persebaran penduduk serta jumlah migrasi penduduk yang mana gejala *urban sprawl* semakin merambat ke arah utara serta timur Kecamatan Cilengkrang. Sedangkan pola ditentukan oleh fasilitas yang sering digunakan penduduk dalam menunjang seluruh kehidupannya. Pola yang terlihat menampilkan gejala *urban sprawl* dipacu oleh perkembangan jalan transportasi yang semakin berkembang.

2. Indikator untuk menentukan proses terjadinya *urban sprawl* di Kecamatan Cilengkrang digunakan kriteria kawasan perkotaan yaitu jumlah dan kepadatan penduduk yang semakin berkembang hingga rerata laju pertumbuhan penduduknya mencapai 10.84% pertahunnya, kelengkapan fasilitas umum mencapai 15 fasilitas, aliran pergerakan penduduk/migrasi semakin meninggi sesuai dengan peningkatan penduduk serta kemudahan aksesibilitas terhadap Kota Bandung serta adanya percampuran penggunaan lahan antara kegiatan pertanian dan non pertanian. Indikator tersebut digunakan melalui beberapa ukuran penilaian secara deskriptif kuantitatif.

Untuk jumlah penduduk digunakan standar perkotaan dimana 25.000 - <100.000 termasuk kota menengah, 100.000 < 800.000 termasuk kota besar.

Untuk kecamatan Cilengkrang termasuk dalam kota menengah, karena pada tahun 2006 jumlah penduduk 39.305 jiwa.

3. Kelengkapan fasilitas dari minimal 8 buah fasilitas umum perkotaan, Kecamatan Cilengkrang sudah memiliki 17 fasilitas umum perkotaan. Selain itu pergerakan penduduk/migrasi yang terjadi cukup signifikan perubahannya selama kurun waktu sepuluh tahun.
4. Faktor pendorong terjadinya *urban sprawl* antara lain adalah meningkatnya heterogenitas kegiatan ekonomi dan sosial di kota sehingga mendorong migrasi penduduk ke kota besar tersebut ke wilayah pinggirannya serta cukup memadainya jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota dengan wilayah belakangnya dalam hal ini wilayah pinggiran kota.

5. Adapun dampak *urban sprawl* terhadap tingkat sosial ekonomi penduduk adalah semakin baiknya jalan yang dapat dilalui oleh transportasi kota sehingga memudahkan orang untuk bertempat tinggal jauh dari tempat bekerja dan bertambahnya penduduk *sub urban* yang berasal dari kota maupun desa – desa di wilayah sekitarnya yang mengakibatkan kebutuhan akan tempat tinggal semakin meningkat. Selain itu dampak urban sprawl yang lain adalah berkaitan dengan kualitas hidup dan kondisi transportasi, yaitu tingginya tarif untuk melakukan perjalanan dan kepemilikan kendaraan, meningkatnya polusi lapisan ozon, besarnya resiko kecelakaan yang serius, berkurangnya pejalan kaki dan menggunakan transportasi alternatif serta terjadinya kelambatan/kemacetan lalu lintas.

Beberapa pertimbangan hasil identifikasi pengaruh urban sprawl kaitannya dengan tingkat sosial ekonomi penduduk Kecamatan Cilengkrang akan ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif apabila urban sprawl terus terjadi di Kecamatan Cilengkrang. Tinjauan pertama sebagai aspek positif bila urban sprawl dibiarkan terjadi adalah :

1. Tinjauan internal (Kecamatan Cilengkrang)

Kecamatan Cilengkrang berdasarkan berdasarkan fungsi pengembangan wilayahnya menjadi berubah, yang semula merupakan pedesaan (berpenduduk kurang dari 25.000 jiwa) dapat menjadi kota kecil bahkan kota sedang (berpenduduk lebih dari 39.000 jiwa). Berdasarkan fungsinya tidak hanya berperan sebagai pusat yang melayani skala lokal tetapi menjadi skala wilayah bagi Kota Bandung.

2. Tinjauan eksternal (Wilayah sekitar dalam konteks yang lebih luas)

Kecamatan Cilengkrang dapat menjadi suatu wilayah yang berperan dalam pengembangan wilayah yang lebih luas. Misalnya berfungsi sebagai wilayah yang menampung pertumbuhan penduduk dari Kota Bandung.

Dari aspek negatif apabila urban sprawl dibiarkan terjadi di Kecamatan Cilengkrang adalah :

1. Tinjauan internal (Kecamatan Cilengkrang)

Terjadinya perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti oleh kebutuhan pemukiman dan kegiatan penduduk yang semakin tinggi. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan fungsi-fungsi kawasan tertentu (misalnya kawasan lindung) sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan di Kecamatan Cilengkrang.

Meningkatnya kebutuhan bagi penduduk akan prasarana dan fasilitas perkotaan yang harus disediakan oleh Kecamatan Cilengkrang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

2. Tinjauan eksternal (Wilayah sekitarnya dalam konteks yang lebih luas)

Kecamatan Cilengkrang menjadi tempat tinggal alternatif bagi penduduk yang bekerja di Kota Bandung maupun kota-kota sekitarnya. Hal ini dapat mengakibatkan tingginya jumlah pergerakan penduduk dari Kecamatan Cilengkrang ke pusat-pusat kota terutama pada jam pergi serta pulang bekerja. Dampak lebih jauh timbulnya kemacetan dan polusi udara yang sangat tinggi dan pada akhirnya menurunkan kualitas hidup penduduk yang tinggal di wilayah pinggiran kota seperti Kecamatan Cilengkrang. Selain itu dengan

berubahnya fungsi Kecamatan Cilengkrang yang semula kawasan penyangga menjadi kawasan/wilayah perkotaan yang menampung tidak hanya penduduk tetapi kegiatan perkotaannya maka akan terjadi alih fungsi besar-besaran dari lahan pertanian, hutan, dan perkebunan menjadi lahan pemukiman maka akan menimbulkan dampak luas seperti banjir, tanah longsor, penurunan muka air tanah dan polusi udara.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa rekomendasi dan saran terutama untuk mengurangi pengaruh *urban sprawl* yang tidak diinginkan pada pengaruh negatifnya yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian pembangunan lahan terbangun sesuai fungsi kawasan, terutama di bagian selatan dan barat Kecamatan Cilengkrang yang masing-masing jika pembangunan terus berlanjut ke tengah sampai utara Kecamatan Cilengkrang akan mengganggu kawasan lindung.
2. Pengaturan pemberian ijin lokasi selain sesuai dengan fungsi lahan dan perntukan ruang juga harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayah, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Perlunya pemberlakuan pola keteraturan terutama untuk mempertahankan fungsi kawasan konservasi di sebelah tengah-utara Kecamatan Cilengkrang dan sawah irigasi teknis di sebelah timur Kecamatan Cilengkrang. Demikian dengan pola pemanfaatan yaitu sebagai

alat pengendali perubahan fungsi ruang di ketiga kawasan tersebut baik di sebelah tengah, utara, ataupun timur Kecamatan Cilengkrang.

3. Dalam hal pengelolaan kawasan terutama di wilayah pinggiran kota, sangat diperlukan sinkronisasi kebijaksanaan, program dan kegiatan antar dinas, badan, lembaga serta antar wilayah (Kabupaten dan Kota Bandung)
4. Pengalihan sebagian pusat – pusat kegiatan perkotaan ke wilayah pinggiran sehingga pergerakan penduduk dari wilayah pinggiran ke pusat kota dapat dikurangi.
5. Pengaturan distribusi penduduk yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan bagi pemukiman yang sesuai fungsi dan infrastrukturnya. Selain itu distribusi penduduk perlu diarahkan tidak mendekati perbatasan dengan Kota Bandung. Hal ini untuk lebih memperjelas fungsi dan ciri khas Kota Bandung dan wilayah pinggirannya. Lebih jauh untuk lahan lahan di sekitar perbatasan antara Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung dibuat *green belt* sehingga diharapkan dapat mengurangi polusi udara.